NOTULEN DISKUSI

Mata kuliah : Sejarah Pendidikan Indonesia
Dosen pengampu : Dr. Syaharuddin, S.Pd., M. A. / Fitri Mardiani, M.Pd.
Anggota kelompok 6 : 1. Illona Alodia 1810111220027
2. Risma Ariyani 1810111220028
3. Sriyani 1810111220029
Materi diskusi : Pendidikan di Surabaya pada Masa Politik Ertis Belanda
Tanggal/tempat : Rabu, 14 Maret 2021/Via Zoom dan WA
Moderator : Risma Ariyani (1810111220028)
Notulis : Illona Alodia (1810111220027)

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1.	Nama: Rama Putra Adyatama NIM: 1810111210020 Kelompok: 2 Pertanyaan: Bagaimana hubungan antara sistem pendidikan dan kurikulum sekolah di masa politik etis Belanda dengan sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia saat ini?	Ditanggapi oleh: Illona Alodia (1810111220027) Jika kita telaah lagi. Sistem pendidikan kita tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan pada masa colonial belanda. Sistem dualisme dan sistem Korkondasi yang diterapkan oleh belanda waktu itu hampir sama dengan sistem pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SRBI). Dimana sistem RSBI lebih menekankan pada bahasa internasional (Inggris) yang lebih disesuaikan dengan gaya pendidikan luar. Seperti adanya pengantar bahasa inggris dan mengutamakan pada golongan tertentu. Sehingga terjadi kesenjangan antara RSBI dan sekolah biasa. Karena RSBI dianggap sekolah elit yang menimbulkan asumsi hanya orang yang

		<p>mampu yang sekolah di situ.</p> <p>Sistem pendidikan Menghambat gerakan Nasional adalah Salah satu cara untuk memutus gerakan nasionalis bangsa kita. Pada pendidikan kita hal tersebut juga pernah terjadi. Kita masih ingat dengan kejadian pada tahun 2010 lalu. Bahwa pada Ujian Nasional (UN) nilai bahasa Indonesia siswa lebih tinggi dengan bahasa inggris, bahkan sampai sekarang. Dan semakin menyusutnya pendidikan budi pekerti yang mengakibatkan banyak siswa suka tawuran. Serta semaraknya budaya luar esperti Korea, Inggri, Jepang dll yang mengakibatkan genarasi muda lupa akan nasionalisme.</p> <p>Kesamaan yang masih melekat di bangsa kita dengan belanda adalah tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Entah sudah berapa kali kurikulum pendidikan di Negara kita diganti. Kurikulum yang katanya untuk perubahan selalu gagal diterapkan pada dunia pendidikan kita. Bahkan juga dinyatakan gagal. Dengan kata lain setiap perubahan atau pergantian adalah bagian dari kurangnya perencanaan pendidikan yang sistematis.</p>
2.	<p>Penanya: Alfianoor Septiawan</p> <p>NIM: 1810111210035</p> <p>Kelompok: 4</p>	<p>Ditanggapi oleh:</p> <p>Sriyani (1810111220029)</p> <p>Jalur sekolah bagi anak Belanda pun sejatinya dapat dimasuki anak Bumiputera dan</p>

<p>Pertanyaan:</p> <p>Bagaimana bentuk pembelajaran yang dilaksanakan pada masa itu terkhusus kepada masyarakat bumi putera dan juga keberlanjutan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada masa politik etis ini di masa selanjutnya?</p>	<p>Tionghoa, meski hanya orang terpilih. Lain halnya dengan pribumi. Jalur sekolah Bumiputera ialah HIS dengan waktu belajar kurang lebih 7 tahun. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan ke MULO, AMS, atau sekolah kejuruan Eropa dan Kweekschool. Adapun sekolah rendah untuk Bumiputera sendiri yakni Sekolah Desa (Volkschool) dan Sekolah Kelas II (Tweede Inlandsche School). Selesai lulus dari sekolah rendah, mereka dapat melanjutkan ke Schakel School agar dapat melanjutkan ke MULO.</p> <p>Sifat dan tujuan sekolah pada saat itu adalah bukan untuk mencerdaskan dan memajukan pendidikan bangsa melainkan untuk menghasilkan pegawai- pegawai yang bisa di bayar murah. Dan pada saat itu, pegawai- pegawai yang dibutuhkan bekerja untuk belanda adalah laki- laki. Karena rakyat, yang masih bersifat kolot, berkeberatan terhadap adanya koedukasi.</p> <p>Materi pelajaran pada saat itu di sesuaikan berdasarkan tujuan dari sekolah tersebut. Pada saat itu tujuan sekolah adalah untuk menghasilkan pegawai Belanda yang bisa di bayar murah (Sejarah Pendidikan , Dra. Hj.Maleha Aziz, dkk, 34). Pegawai- pegawai Belanda memiliki berbagai jenis pekerjaanya, yaitu penjaga gudang, pemungut pajak, bupati, wedana, dan juga mantri. Sesuai dengan profesi tersebut maka di berikanlah materinya</p>
--	--

	<p>yaitu menghitung, mengukur tanah, membaca, dan menggambar. Materi ini sangat menunjang dalam siswa yang nantinya sebagai pegawai Belanda di dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, yang pada saat itu kebijakannya adalah tanam paksa (<i>Cultuurstelsel</i>) oleh gubernur Van Den Bosch. Selain materi itu, bahasa melayu juga di jadikan materi pada saat itu. Hal ini di karenakan bahasa melayu digunakan bahasa resmi sehingga bahasa melayu dianggap penting. Sehingga pada saat itu bahasa melayu digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam sekolah maupun di dalam bahasa sehari-hari. Selain bahasa melayu bahasa daerah juga di jadikan materi di sekolah BUMI PUTERA.</p> <p>Ditambahkan oleh:</p> <p>Risma Ariyani (1810111220028)</p> <p>Melalui kebijakan pendidikan Politik Etis di Surabaya, orang-orang bumi putera harus diperkenalkan kan budaya dan pengetahuan Barat. Seperti salah satu sekolah bumi putera ialah HIS (<i>Hollandsch Inlandsche School</i>). Marwati dan Notosusanto, (dalam Syaharuddin & Heri Susanto, 2019:38) bahwa pemerintah Belanda mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa
--	---

		<p>Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.</p> <p>b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.</p> <p>Dan Melalui kebijakan ini, Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, serta pada sektor swasta Belanda. Dan edukasi lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan tenaga terampil yang murah. Sekolah yang dibuka umumnya hanya bisa dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan orang kaya. Dan pada masa selanjutnya dari kebijakan Trias Politika melahirkan dampak positif pada penduduk pribumi dalam bidang pendidikan. Politik Etis memunculkan elit baru di kalangan masyarakat pribumi yang menyadari harga dirinya. Elit baru ini kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal pergerakan nasional dan melahirkan kebangsaan Indonesia.</p>
--	--	---

Tambahan materi dari para peserta diskusi:

- a. Muhammad Firnanda (1810111210033), menambahkan bahwasanya pendidikan masa politik etis ini adalah bagian dari trias van devender, yakni edukasi. Foto terlampir:

- b. Siti Hatifah (1810111220030), menambahkan informasi mengenai dampak pendidikan masa politik. Pada link terlampir, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/23/180000769/dampak-positif-pembangunan-sekolah-di-masa-politik-etis-bagi-indonesia>
- c. Mulyani Safitri (1810111220023), menambahkan jurnal yang berkaitan dengan materi diskusi dengan judul *“Perkembangan Politik Etis Sektor Pendidikan di Surabaya pada Masa Pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg Tahun 1909-1916”*.

Kesimpulan Diskusi:

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan era kolonial di Hindia Belanda tidak lepas dari peran kebijakan Politik Balas Budi. Kebijakan ini pula berdampak di wilayah Surabaya. Berkembangnya aktivitas perekonomian seperti, perkebunan, industri, yang didukung dengan pesatnya Pelabuhan Tanjung Perak, menjadikan masyarakat dari berbagai golongan tertarik untuk menetap di Surabaya. Meningkatnya lapangan pekerjaan selaras dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, mendorong peningkatan infrastruktur pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik yang mendukung perindustrian di Surabaya.